



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	8 (<i>delapan</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang.
Hari, Tanggal	:	Kamis, 25 Juni 2020
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Dibuka oleh Faisol Riza, Ketua Komisi VI DPR RI, dilanjutkan oleh Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2021
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kurnia Toha; 3. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Ahmad; 4. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam), Muhamad Rudi; dan 5. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS), Razuardi, beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 14.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 25 Juni 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin dan dibuka oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza, kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan virtual.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima Pagu Indikatif Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 sebesar **Rp 108.689.815.000,-** (*Seratus Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri atas 2 (dua) Program, yaitu:
 - a. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp.26.553.100.000,- (*Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*).
 - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 82.136.715.000,- (*Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui pengajuan penambahan pagu indikatif Tahun Anggaran 2021 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebesar Rp. 52.167.731.000,- (*Lima Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*) menjadi Rp.160.857.546.000,- (*Seratus Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI menerima Pagu Indikatif Anggaran Badan Standardisasi Nasional, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 sebesar **Rp.265.996.133.000,-** (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang terdiri atas 2 (dua) Program, yaitu:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 154.236.802.000,- (*Seratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*).
 - b. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp.111.759.331.000,- (*Seratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menerima Pagu Indikatif Badan Pengusahaan Batam, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 sebesar **Rp.2.014.200.000.000,-** (*Dua Triliun Empat Belas Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*) dan menyetujui penyesuaian pagu anggaran atas 2 (dua) Program, yaitu:
 - a. Program Dukungan Manajemen semula sebesar Rp.642.682.610.000,- (*Enam Ratus Empat Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) menjadi Rp.816.738.404.000,- (*Delapan Ratus Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah*).

- b. Program Pengembangan Kawasan Strategis semula sebesar Rp.1.371.517.390.000,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp.1.197.461.596.000 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI menerima Pagu Indikatif Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 sebesar **Rp.94.978.297.000,-** (*Sembilan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas 2 (*dua*) Program dan Badan Layanan Umum (BLU)kj, yaitu:
- a. Program Dukungan Manajemen yang semula sebesar Rp.37.896.400.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp 43.887.481.000,- (*Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- b. Program Pengembangan Kawasan Strategis semula sebesar Rp.53.823.079.000,- (*Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) menjadi Rp. 47.831.998.000 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- c. Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 3.258.818.000,- (*Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
6. Komisi VI DPR RI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengusahaan Batam, Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.25 WIB.

Jakarta, 25 Juni 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.
A-103